

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Alasan Pemilihan Judul**

Krisis ekonomi, menurunnya legitimasi pemerintah serta adanya campur tangan bangsa lain merupakan beberapa penyebab beralihnya sistem pemerintahan suatu negara yang otoriter menjadi demokratis. Perubahan-perubahan tersebut melanda beberapa negara dalam kurun waktu tertentu, sehingga mengakibatkan sebuah gelombang demokrasi dunia.

Di tahun 1970-an sampai tahun 1980-an telah terjadi perubahan dimana banyak negara dengan sistem pemerintahan otoriter mengubah dirinya menjadi demokratis. Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut oleh Samuel P. Huntington dinamakan sebagai "*The Third Wave of Democratization*", atau gelombang demokratisasi ketiga. Gelombang demokratisasi ketiga tersebut berawal dari negara-negara di Eropa Selatan, seperti Portugal dan Yunani di tahun 1974 dan di Spanyol pada tahun 1975. Kemudian gelombang tersebut bergerak menuju Amerika Latin di akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1990-an dan di awal tahun 1980-an sampai awal 1990-an gelombang tersebut bergerak sampai ke Asia, Afrika dan Eropa Timur serta menghancurkan sebagian besar rezim komunis.

Nikaragua, sebagai salah satu negara di Amerika Tengah yang mempunyai pemerintahan otoriter, tidak terlepas dari proses transisi menuju demokrasi. Transisi tersebut dimulai dengan tumbangannya rezim yang berbasis ideologi  
M... Daniel Ortega. Rezim tersebut dikalahkan oleh partai

oposisi *Union Nacional Opposition/The National Opposition* (UNO), yang merupakan koalisi dari 14 partai yang dipimpin oleh Violetta Barrios de Chamorro, dalam pemilu yang demokratis. UNO menang dalam pemilu dengan memperoleh suara sebanyak 54,7%, sementara *The Sandinista National Liberation Front (FSLN)* hanya mampu meraih suara sebanyak 40,8%.<sup>1</sup> Kemenangan UNO tersebut sangat menakjubkan sehingga sejak saat itulah Nikaragua memasuki proses transisi menuju negara demokratis.

Rezim Sandinista yang berbasiskan ideologi Marxist-Leninist memberlakukan sistem ekonomi terpusat sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara komunis. Kontrol ketat diberlakukan dalam semua aspek kehidupan dan partisipasi warga negara dibatasi. Namun dalam perkembangannya rezim tersebut tidak mampu mengatasi masalah perekonomian negara yang sudah akut seperti inflasi yang tinggi. Ketidakmampuan rezim dalam menanggulangi masalah ekonomi yang semakin memburuk menimbulkan kekecewaan, frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan rezim dalam memperbaiki perekonomian nasional.

Mengapa dan bagaimana transisi menuju demokrasi berlangsung di Nikaragua merupakan kasus yang sangat menarik bagi penulis untuk menelitinya.

---

## **I.2. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang jalannya transisi demokrasi di sebuah negara dan mengetahui apa saja yang menjadi penyebabnya.

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di bidang ilmu politik.

## **I.3. Latar Belakang Masalah**

Masa kepemimpinan diktator dinasti Somoza yang berkuasa selama 46 tahun telah berakhir dengan adanya revolusi rakyat Sandinista di tahun 1979. Kekuasaan kemudian diambil alih oleh gerakan oposisi yang menamakan dirinya *The Sandinista National Liberation Front* (FSLN), yang dibentuk oleh Jose Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga dan Thomas Borge Martinez pada tanggal 26 Juli 1961. Untuk melaksanakan revolusi di Nikaragua, gerakan ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Marxisme-Leninisme sebagai landasannya. Adapun tujuan dari revolusi tersebut adalah: *pertama*, pembangunan kembali keadaan masyarakat, dengan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat dan memperbaiki taraf kehidupan serta meningkatkan perekonomian kelas bawah. *Kedua*, pembangunan kembali perekonomian nasional. *Ketiga*, menghilangkan penindasan rezim lama terhadap masyarakat. *Keempat*, memberantas korupsi warisan rezim lama. *Kelima*, membangun demokrasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan dan

menjamin hak-hak asasi manusia.<sup>2</sup> Namun, dalam menjalankan pemerintahannya, Rezim Sandinista telah melanggar prinsip-prinsip yang telah dikemukakan sejak awal. Selama berkuasa, Rezim Sandinista telah melakukan sejumlah pelanggaran. Janji bahwa demokrasi akan ditegakkan dalam prakteknya tidak pernah terwujud. Bahkan, Rezim Sandinista melakukan berbagai tindakan semena-mena terhadap rakyat dengan cara membungkam kebebasan pers. Sandinista juga bersekutu dengan Kuba dan Uni Soviet serta berkeinginan membangun masyarakat berbasis Marxist-Leninist (Komunis).

Amerika Serikat yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi sangat menentang rezim Sandinista yang semakin condong ke arah komunis. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Amerika Tengah mempunyai tujuan khusus, yaitu menegakkan demokrasi. Sejalan dengan kebijakan luar negeri tersebut, Amerika Serikat membantu negara-negara dalam meningkatkan pertumbuhan demokrasi maupun praktek-praktek lembaga demokrasi. Amerika Serikat juga mendorong pembangunan ekonomi, membantu dialog dan perundingan antara negara dalam kawasan dan memberikan bantuan keamanan kepada bangsa-bangsa yang diserang oleh kekuatan gerilya yang didukung oleh Kuba dan Nikaragua.

Berdasarkan tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut, maka pemerintah Amerika Serikat memandang Rezim Sandinista cenderung bertindak otoriter serta tidak menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Oleh karena itu, Amerika Serikat melakukan intervensi militer terhadap Nikaragua dengan memberikan

bantuan keuangan kepada kelompok anti Sandinista yang disebut *Contras* untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Rezim Sandinista. Berkat dukungan dan bantuan dari Amerika Serikat, pemberontakan yang disponsori oleh *Contras* berlangsung semakin intensif.

Kaum oposisi secara terus-menerus memberikan tekanan pada pemerintahan Sandinista. Di saat yang sama, ketidakmampuan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian yang semakin memburuk, tindakannya yang semakin represif terhadap rakyat menyebabkan Rezim Sandinista tidak mendapat dukungan penuh dari rakyat. Sehingga pada tanggal 25 Februari 1990, Rezim Sandinista dikalahkan oleh pihak oposisi dalam pemilu yang demokratis. Dengan kekalahan tersebut berarti Rezim Sandinista telah tumbang dan digantikan rezim baru yang menamakan dirinya *The UNO*.

#### **I.4. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diutarakan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses transisi dari rezim otoriter menuju demokratis itu berlangsung di Nikaragua?

#### **I.5. Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah memahami penelitian ini perlu diketahui beberapa konsep penting yaitu: Konsep Transisi Rezim dan Konsep Legitimasi. *Konsep Transisi Rezim*, merupakan proses transisi politik di mana terjadi peralihan rezim dari satu bentuk ke bentuk lain, yang melibatkan berbagai kelompok yang

Pengertian sederhana dari transisi adalah selang waktu antara satu rezim<sup>3</sup> politik dan rezim yang lain. Samuel P. Huntington mengelompokkan transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis ke dalam empat tipe besar, yaitu:

1. *Transformasi*, terjadi ketika elite yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem demokratis
2. *Replacement* atau pergantian, terjadi saat kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan.
3. *Transplacement*, terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi.<sup>4</sup>
4. Intervensi yang jarang terjadi, di mana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor lain dari luar.<sup>5</sup>

Transisi rezim yang berlangsung di Nikaragua termasuk ke dalam tipe *transplacement*. Sebab, proses demokratisasi merupakan hasil aksi bersama antara pemerintah dan kelompok oposisi. Pemerintah dan oposisi mempunyai kekuatan yang sama kuatnya sehingga tidak dapat saling menyingkirkan. Situasi yang buntu tersebut mendorong kedua belah pihak untuk bekerjasama. UNO merasa terancam akan kontrol Sandinista yang berlebihan terhadap angkatan bersenjata dan ketidakmampuan Sandinista untuk menyerahkan kekuasaan secara menyeluruh kepada pemerintahan yang baru. Di pihak Sandinista, ada kekhawatiran akan

---

<sup>3</sup> "Rezim" berasal dari kata *rule of game* atau aturan main yang diterapkan oleh si pemegang kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

<sup>4</sup> Samuel P. Huntington, *op.cit.*, hal. 146-191

adanya ajang balas dendam gerilyawan *Contras* terhadap para pendukungnya. Situasi tersebut yang membuat keduanya sepakat untuk mengadakan perundingan. Humberto Ortega Savedra mewakili pihak Sandinista, sedangkan Antonio Lacayo dari pihak UNO mengadakan perundingan berkenaan dengan proses pergantian kekuasaan. Perundingan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1990 di kantor pusat Presiden Carter, Universitas Emory di Managua. Bertindak sebagai penengah yaitu Presiden Carter, Sekretaris Jendral *Organization American States* (OAS) Joao Baena dan Elliot Richardson dari *United Nations* (UN)<sup>6</sup>. Masalah yang dibahas adalah mengenai demobilisasi *Contras*, penyatuan kekuatan militer, hak-hak kepemilikan dan *land reform*. Kedua belah pihak telah sepakat akan secepat mungkin melakukan demobilisasi<sup>7</sup> terhadap *Contras* sehingga peralihan kekuasaan pada tanggal 25 April 1990 akan sempurna, termasuk hak presiden terpilih, Violetta Chamorro untuk memberikan nama terhadap kabinet yang dipimpinnya. Pada tanggal 30 Mei 1990, pemerintahan Sandinista menandatangani persetujuan untuk melancarkan gencatan senjata dan demobilisasi *Contras* secara menyeluruh pada 26 Juni 1990. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar transisi rezim dapat berlangsung yakni adanya kemauan untuk mengambil inisiatif melakukan transisi menuju demokrasi.<sup>8</sup>

Pada kasus Nikaragua, salah satu penyebab terjadinya transisi dari rezim otoriter menjadi demokratis adalah adanya intervensi pihak asing yaitu: Amerika Serikat. Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dilandasi persepsi bahwa

---

<sup>6</sup> Jennifer L. McCoy, *op.cit.*, hal. 117

<sup>7</sup> "Demobilisasi" adalah pengurangan besar-besaran kekuatan militer suatu bangsa mengiringi terjadinya peperangan atau keadaan darurat nasional lain, dilakukan dengan memberhentikan para milisi dan cadangan dari dinas aktif.

<sup>8</sup> Mohtar Mas' oed, *op.cit.*, hal. 21

dominasi dan monopoli kekuasaan FSLN yang berhalauan Marxist-Leninist dianggap sangat mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat di Amerika Tengah, yaitu menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Semasa pemerintahan Ronald Reagan, CIA mendukung perjuangan gerilyawan *Contrarevolucionaris Counter Revolutionary Forces (Contras)* dengan memberikan bantuan keuangan, persenjataan, latihan-latihan militer maupun dukungan logistik untuk membantu menggulingkan Rezim Sandinista. Dengan membuka tempat-tempat latihan kemiliteran bagi gerilyawan *Contras*, khususnya kaum *Contras Somoza* di wilayah bagian selatan Honduras dan memberikan bantuan keuangan sebesar 19 juta dolar AS untuk kegiatan terorisme dan militer, Amerika Serikat juga melakukan embargo ekonomi terhadap Rezim Sandinista dengan memblokir berbagai bantuan ekonomi untuk Nikaragua yang berasal dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Inter Amerika dan IMF serta beberapa jenis kuota ekspor Nikaragua ke Amerika Serikat. Bantuan keuangan sebesar sembilan juta dolar AS juga diberikan oleh Amerika Serikat kepada kelompok oposisi guna mendorong terpilihnya pemerintahan demokratis. Semua bantuan tersebut diberikan melalui *National Endowment for Democracy*.<sup>9</sup>

Rezim Sandinista dinilai Amerika Serikat telah melanggar praktek-praktek demokrasi, karena dalam menjalankan pemerintahannya Rezim Sandinista berjanji akan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, melindungi hak-hak asasi manusia, menjamin pluralisme ekonomi dan politik serta melaksanakan politik luar negeri yang tidak memihak. Namun, di dalam kenyataannya rezim ini

---

<sup>9</sup> *Nicaragua: A Country Study*, <http://memory.loc.gov/frd/cs/nitoc.html>



bertindak sewenang-wenang dengan melakukan sensor ketat terhadap pers nasional, melakukan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia seperti penyerangan terhadap Paus dan gereja serta membunuh dan mengungsikan dengan paksa suku Miskito, minoritas Nikaragua. Rezim Sandinista juga memberikan bantuan persenjataan kepada kaum gerilyawan El Savador, membina hubungan dekat dengan Kuba dan Uni Soviet. Dengan alasan tersebut, Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan intervensi militer, dengan membantu secara aktif gerakan anti Sandinista (*Contras*).

*Konsep kedua*, legitimasi. Legitimasi politik pada intinya merupakan pengakuan kekuasaan dari rakyat kepada penguasa atau dapat juga dikatakan:

1. Hak untuk berkuasa sehingga ditaati oleh rakyatnya.
2. Pengakuan kekuasaan penguasa oleh rakyat (yang dikuasai) yang ditunjukkan dengan ketaatan.
3. Keabsahan kekuasaan untuk memimpin dan mengatur atau mengontrol rakyat dan rakyat mengakui keabsahan tersebut.

Legitimasi menurut Lucian W. Pye didefinisikan sebagai "*sesuatu yang melibatkan kemampuan suatu sistem dan sentimen masyarakat terhadap otoritas pemerintahan*" (*Legitimacy involves both the performance capacity of the system and the sentiments of population toward governmental authority*).<sup>10</sup>

Howard Wriggins mengkaitkan legitimasi dengan kapasitas atau kemampuan suatu sistem untuk menjalankan fungsinya. Menurut Howard Wriggins apabila

---

seseorang telah berkuasa ada delapan strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya, yaitu:

1. Memanfaatkan kepribadian/kharisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin.
2. Membentuk organisasi seperti partai politik, angkatan bersenjata, polisi rahasia dan birokrasi.
3. Mengembangkan suatu ideologi tertentu.
4. Memberi hadiah atau imbalan kepada mereka yang dipercayai atau mungkin dipengaruhi.
5. Melakukan intimidasi terhadap lawan dan kawan yang dianggap membahayakan posisi penguasa.
6. Memperluas partai politik.
7. Melalui kebijakan atau politik luar negeri.
8. Membangun perekonomian.<sup>11</sup>

Strategi awal Rezim Sandinista dalam mempertahankan kekuasaannya adalah dengan membangun perekonomian dalam negeri yang hancur sebagai warisan dari Rezim Somoza. Namun, usaha yang ditempuh oleh rezim mengalami kegagalan. Bahkan, angka inflasi melonjak pesat mencapai lebih dari 14000% pada tahun 1988. Tindakan pemerintah untuk mengurangi inflasi dengan melakukan kontrol ketat terhadap harga barang dan meluncurkan mata uang baru, memang membuat hasil yang menggembirakan. Terbukti pada Agustus 1988, inflasi sempat menurun sampai 240 % /tahun.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Howard Wriggins, *The Rule's Imperative*, Columbia University Press, New York, 1969, hal. 10-11

<sup>12</sup> *Nicaragua: A Country Study*, <http://memory.loc.gov/frd/cs/nitoc.html>

Namun, dalam perkembangannya usaha tersebut mengalami kegagalan sehingga inflasi tidak terkendali lagi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran ekonomi Nikaragua antara lain karena: gempa bumi yang melanda Nikaragua dan kemudian disusul oleh kekacauan dan pemberontakan yang melanda di seluruh negeri. Keadaan tersebut diperburuk dengan munculnya gerakan oposisi, sebagai akibat penolakan terhadap rezim yang berkuasa. Pada gilirannya rezim kehilangan legitimasi atas kekuasaannya karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyat yang mencapai klimaksnya dengan kekalahan Sandinista dalam pemilu pada tahun 1990 oleh pihak oposisi.

#### **I.6. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teoritik yang telah dibangun dan diuraikan sebelumnya, maka dapat diturunkan hipotesis bahwa transisi dari rezim otoriter menuju demokratis di Nikaragua mengambil bentuk *transplacement* di mana terjadi kompromi bersama antara pemerintah dan kelompok oposisi.

#### **I.7. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai jangkauan waktu yang dimulai pada awal tahun 1980 ketika muncul gerakan-gerakan kaum oposisi yang menentang Rezim Sandinista dan sekaligus memasuki proses transisi menuju demokrasi. Fokus penelitian ini berakhir pada tahun 1990 ketika pemerintahan Sandinista tumbang dan digantikan oleh Rezim Chamorro yang demokratik setelah memperoleh kemenangan dalam pemilu. Dimensi penelitian juga menjangkau tahun-tahun

## **I.8. Metode Penelitian**

Tulisan ini akan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan pengumpulan data sekunder dari buku-buku, majalah, internet maupun jurnal.

## **I.9. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

**BAB I:** Berisi pendahuluan yang akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Konseptualisasi Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Menjelaskan munculnya gerakan Sandinista (FSLN) dan masa pemerintahan Rezim Sandinista di Nikaragua (1979-1990).

**BAB III:** Menjelaskan kondisi-kondisi yang turut mendukung terjadinya proses transisi menuju demokrasi di awal 1990, yaitu: faktor eksternal berupa adanya intervensi asing dan faktor internal berupa merosotnya legitimasi Rezim Sandinista.

**BAB IV:** Menjelaskan bagaimana proses transisi dari rezim otoriter ke demokratis berlangsung menggunakan bentuk *transplacement* yang melibatkan pemerintah, yang diwakili oleh rezim Sandinista dan pihak oposisi yang diwakili oleh UNO